

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

**KEGIATAN
PEMBINAAN DAN KOORDINASI PEMANTAPAN
IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN**



**BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TAHUN 2019**

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN PEMBINAAN DAN KOORDINASI PEMANTAPAN
IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Menghadapi persaingan era globalisasi, menuntut peran aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk tanggap dan memiliki kesiapan dalam mengantisipasi dampak dari globalisasi ini. Oleh karena itu menyiapkan kecerdasan masyarakat yang berkualitas, merupakan faktor penentu yang sangat penting dan strategis dalam menjaga eksistensi masa depan bangsa dan negara yang berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sangat diperlukan sebagai upaya pembinaan karakter dan jati diri bangsa, guna meningkatkan kualitas kebangsaan, sehingga bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan yang dihadapi, termasuk yang paling berat yaitu ancaman disintegrasi bangsa.

Menyadari konstelasi geografis dan pluralisme bangsa, sesungguhnya pembangunan wawasan kebangsaan adalah merupakan fondasi, dimana akan diletakkan dasar-dasar semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan pada hakikatnya mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu tujuan politik yang harus dimiliki dan diwujudkan oleh suatu negara, khususnya negara kebangsaan. Tanpa persatuan dan kesatuan, kiranya tujuan yang lebih luhur, seperti terciptanya kesejahteraan umum dan keadilan sosial, mustahil akan tercapai.

Oleh karena itu, diharapkan setiap elemen bangsa dapat bersama-sama dan tanpa hentinya melakukan upaya positif yang berkelanjutan, demi selalu terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa secara berkesinambungan. Ketahanan dan kewaspadaan nasional serta rasa nasionalisme yang tinggi, sikap berbangga dan rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia merupakan hal yang mutlak dimiliki setiap generasi terutama generasi muda, sebagai penerus tongkat estafet perjuangan bangsa yang sudah demikian jauh. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, haruslah dijadikan landasan dan komitmen moral dalam bersikap dan bertingkah laku, sehingga hal-hal yang menjurus pada terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa dapat dihindari.

Kebijakan Pemantapan Ideologi dan pembangunan wawasan kebangsaan, guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa diarahkan pada langkah-langkah kongkrit pemantapan Ideologi Pancasila dan peningkatan wawasan kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian aktualisasi Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah merupakan partisipasi kebangsaan secara nyata oleh setiap warga bangsa dan komponen bangsa, atau sebagai indikator berperannya (memberikan kontribusi) dalam membangun bangsa untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mengangkat harkat dan martabat bangsa di tengah-tengah pergaulan antar bangsa di dunia yang semakin kompetitif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah nyata tentang pentingnya Pemantapan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu dilaksanakan pembinaan dan koordinasi di jajaran Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat.

B. DASAR HUKUM

1. TAP MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pemanjapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
2. TAP MPR Nomor VI tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 893.3 /2877/SJ/2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataran Ketahanan Bangsa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 200/2397/SJ tanggal 28 Juni 2011 tentang Penguatan Wawasan Kebangsaan;
16. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 220/1507.DIII tanggal 20 Juli 2011 tentang Pembekalan Wawasan Kebangsaan bagi Ormas/LSM/LNL;
17. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tentang pentingnya penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa guna mencegah timbulnya disintegrasi bangsa.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ini adalah, agar Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota memahami tentang pentingnya pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dan dapat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemantapan Ideologi dan Wasbang dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, adalah :

- a. Meningkatnya pemahaman Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota tentang pentingnya penguatan Ideologi Pancasila dan

Wawasan Kebangsaan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

- b. Meningkatnya pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

BAB II

PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah memberikan pembinaan secara langsung kepada Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten dan Kota di Daerah Sumatera Barat.

B. METODOLOGI

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Koordinasi secara langsung kepada Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota
2. Diskusi menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan penguatan Ideologi dan Wasbang.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan untuk Tahun 2019 ini direncanakan untuk 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, yaitu :

1. Kabupaten Agam
2. Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Kabupaten Tanah Datar
4. Kabupaten Solok

5. Kabupaten Dharmasraya
6. Kabupaten Solok Selatan
7. Kabupaten Pesisir Selatan
8. Kabupaten Padang Pariaman
9. Kabupaten Pasaman
10. Kabupaten Pasaman Barat
11. Kabupaten Sijunjung
12. Kabupaten Kepulauan Mentawai
13. Kota Padang
14. Kota Pariaman
15. Kota Bukittinggi
16. Kota Payakumbuh
17. Kota Solok
18. Kota Sawahlunto
19. Kota Padang Panjang

2. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ini direncanakan dilaksanakan pada Triwulan I dan II Tahun 2019.

BAB III PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, pada kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

B. PEMANFAATAN DANA


Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan didukung dengan dana sebesar Rp. 69.444.612,- (Enam puluh

sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua belas rupiah), dengan rincian dana untuk triwulan I sebesar 46.941.350,- (empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan dana untuk triwulan II sebesar Rp. 22.503.262,- (dua puluh dua juta lima ratus tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya Belanja Barang dan Jasa.


BAB IV
PENUTUP

1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
2. Setelah selesai kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019
KABID IDEOLOGI DAN WASBANG


FIRDAUS, SH
Pembina
NIP. 19641231 198703 1 094

Menyetujui:
KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI SUMATERA BARAT


NAZWIK, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008